

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya dan merancang kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Belanja Sosial. Ketiga komponen ini tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah, tetapi juga menjadi penentu arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Dalam konteks pembangunan daerah pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan serta berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan ekonomi negatif menunjukkan adanya penurunan dalam perekonomian. Di Provinsi Riau, dinamika pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan belanja sosial. Ketiga variabel ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, di mana pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD serta mengalokasikan belanja modal dan belanja sosial secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Secara khusus, peningkatan Pad menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah di Provinsi Riau. Pad merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah

daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Dengan meningkatnya PAD, Belanja modal maupun Belanja Sosial. Data yang diambil dari Portal Sistem Informasi Keuangan daerah (SIKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya trend peningkatan PAD di Provinsi Riau. Peningkatan ini tidak terlepas dari Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari berbagai sumber penerimaan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, Bagi hasil pajak, dan bagi hasil bukan pajak. Menurut Saputra (2023) Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayah tersebut.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu wilayah. Namun demikian, besarnya penerimaan PAD tidak serta-merta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak diiringi dengan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang efektif. Salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah adalah Belanja Modal. Belanja Modal menjadi faktor penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah karena dialokasikan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Secara umum, Belanja Modal merupakan bagian dari struktur anggaran dalam APBN maupun APBD yang mencakup pengeluaran pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh, membangun, atau meningkatkan aset tetap fisik yang bersifat jangka panjang, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta penyediaan peralatan penunjang pelayanan publik. Namun, hasil penelitian yang

dilakukan oleh Saputra (2023) menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, Miftahul Rusyda (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa belanja daerah, termasuk di dalamnya Belanja Modal, berkaitan erat dengan peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Belanja daerah dipandang sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, belanja pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengeluaran rutin, tetapi juga sebagai stimulus untuk mempercepat aktivitas dan pembangunan ekonomi daerah.

Belanja daerah diukur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung, di mana Belanja Modal termasuk sebagai komponen utama dalam pembiayaan pembangunan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun alokasi belanja, termasuk Belanja Modal, telah diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan pengaruh yang kuat. Selain Belanja Modal yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan aset jangka panjang, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk Belanja Sosial sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja sosial menjadi instrumen penting dalam APBD karena diarahkan langsung untuk memberikan perlindungan, pemerataan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika belanja modal lebih menekankan pada pembangunan fisik yang mendorong produktivitas ekonomi, maka belanja sosial berfungsi sebagai jaring pengaman yang memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan demikian, keberadaan belanja sosial, khususnya dalam bentuk bantuan sosial (bansos), diharapkan dapat menurunkan kesenjangan, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkuat daya beli masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah. Bantuan Sosial merupakan program pemerintah yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial tercantum Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang miskin, tidak mampu, serta yang rentan terhadap risiko sosial.

Sehingga program Bantuan Sosial ini bertujuan langsung untuk memberikan bantuan pada kelompok masyarakat tertentu seperti dalam kondisi memiliki resiko sosial guna mempermudah perekonomiannya atau mengembangkan potensi yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut dengan diberikan Bantuan Sosial berupa uang tunai maupun berupa bantuan non tunai. Nanda Salsabila (2024). Disisi lain, Belanja Sosial juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi daerah. Belanja Sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang ditunjukkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, seperti Bantuan Sosial, Subsidi dan program-program kesejahteraan lainnya. Melalui Belanja sosial, pemerintah daerah berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Peningkatan Belanja sosial diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik.

Data yang bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa alokasi Belanja Sosial di Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berkembang. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Belanja Sosial mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu analisis yang komprehensif untuk mengkaji sejauh mana pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Belanja Sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Analisis ini menjadi penting

sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD, Belanja Modal, dan Belanja Sosial merupakan faktor-faktor yang memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

Tabel 1.1 Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Kuantan Singingi	3,75	4,75	2,87	3,12
2.	Indragiri Hulu	4,26	4,63	4,39	3,74
3.	Indragiri Hilir	4,41	5,25	3,17	3,1
4.	Pelalawan	4,07	4,39	4,69	4,36
5.	Siak	2,31	3,78	4,35	4,37
6.	Kampar	3,45	4,83	4,22	2,72
7.	Rokan Hulu	4,98	5,02	4,12	2,71
8.	Bengkalis	0,51	2,22	2,77	0,93
9.	Rokan Hilir	1,63	2,64	2,83	1,69
10.	Meranti	2,56	3,17	4,81	3,33
11.	Pekanbaru	5,24	6,78	6,06	4,61
12.	Dumai	5,98	6,36	6,05	5,02

Sumber: BPS 2021-2024

Menurut Tabel 1.1 Pertumbuhan ekonomi untuk 4 tahun secara berkala, 2021- 2024 terjadi kenaikan Pertumbuhan Ekonomi yang signifikan di hampir semua kabupaten/kota. Nilai Pertumbuhan banyak yang melonjak dari kisaran 3-4% ke atas 4-5% bahkan ada yang mencapai 6-7%. Beberapa Daerah ada Kenaikan Terbesar seperti Pekanbaru (2021-2022): Naik 1,54% dari 5.24% menjadi 6.78%. Sebagai ibu kota provinsi, pusat perdagangan dan jasa, pemulihannya sangat cepat. Siak (2021 2022): Naik 1.47% dari 2.31% menjadi 3.78%. Menunjukkan percepatan yang imprsif dari basis yang rendah. Kuantan singingi (2021-2022): Naik 1.00% dari 3.75% menjadi 4.75%. Sedangkan Penurunan terbesar dari tahu ke tahun ada di Kabupaten Bengkalis (2023-2024): turun drastis sebesar 1.84% dari

2.77% menjadi 0.93%. Penurunan ini sangat curam dan mengkhawatirkan, mengindikasikan guncangan hebat pada sektor utama di daerah tersebut, kemungkinan besar terkait komoditas kepala sawit/minyak. Rokan Hulu (2023-2024): turun 0.41% dari 4.12% menjadi 2.71%. Kampar (2023-2024): Turun 1.50% dari 4.22% menjadi 2.72%. Dumai (2022-2024): Turun 0.31% dari 6.36% menjadi 6.05%. Meski angkanya kecil, Penurunan dari level pertumbuhan inggi tetap signifikan. Dumai juga mengalami penurunan lagi di tahun 2024. Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu menunjukkan tren yang relatif stabil bahkan cenderung meningkat, hal ini menandakan bahwa perekonomian di wilayah tersebut cukup terjaga meski terjadi penurunan ekonomi secara umum. <https://www.bps.go.id/id>. Berdasarkan paparan masalah tersebut.

Hasil penelitian dari Saputa (2023) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Belanja Modal (BM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (TK). Dari hasil penelitian Miftahul Rusyda (2024) Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, Selanjutnya, PAD menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Daerah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dari Penelitian Nanda Salsabila (2024) menggunakan studi pustaka (literature review) dengan data sekunder Artinya, penelitian tidak melakukan analisis empiris/statistik dengan data kuantitatif (misalnya regresi, panel data, atau studi kasus wilayah tertentu). Sehingga kesimpulan masih bersifat deskriptif, belum menguji secara signifikan efektivitas Bansos.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau?

2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau?
3. Apakah Belanja Sosial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Belanja Sosial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah untuk penelitian ini dibatasi pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Modal dan Belanja Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2021-2024. tidak menganalisis faktor-faktor lain di luar PAD, belanja modal, dan belanja sosial, seperti investasi swasta, ekspor-impor, inflasi, atau jumlah tenaga kerja, walaupun faktor-faktor tersebut juga berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Riau dalam beberapa Tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Riau selama periode penelitian.
3. Untuk mengetahui pengaruh Perkembangan Belanja Sosial di Provinsi Riau.
4. Untuk mengetahui dan Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Belanja Sosial secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dalam menganalisis data keuangan daerah secara ilmiah, khususnya mengenai bagaimana komponen fiskal seperti PAD, belanja modal, dan belanja sosial dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2. Secara Praktis

a. Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mahasiswa akuntansi dalam menentukan keputusan untuk memilih karir sebagai akuntan publik

b. Pemerintah

Bahan referensi untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya peningkatan Pertumbuhan ekonomi.

c. Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik ataupun mahasiswa yang lainnya.